

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu penting bagi negara-negara di seluruh dunia, oleh sebab itu dalam penanganannya harus dalam konteks global. Pada tahun 2002 sebanyak 189 negara mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan *the Millenium Development Goals* (MDGs). Dimana salah satu targetnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan pada tahun 2015 (Ishartono dan Raharjo, 2016).

Era MDGs berakhir dengan berhasil mengeluarkan sekitar 700 penduduk dunia dari kemiskinan ekstrem, meningkatnya kesehatan melalui ketersediaan terhadap akses air bersih dan kemajuan dibidang pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan era *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) menjadi tujuan utama. Hal ini menunjukkan negara-negara di dunia sepakat meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun. Tujuan SDGs dalam pengentasan kemiskinan diantaranya yaitu dunia tanpa kelaparan, kualitas yang baik di bidang kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan, kesetaraan gender, tersedianya air bersih dan sanitasi layak, keterjangkauan energi, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi serta infrastruktur dan berkurangnya ketimpangan (Ishartono dan Raharjo, 2016).

Menurut Annim *et al.* (2012) dalam Sugiyarto, Mulyo dan Seleky (2015) ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang pragmatis dengan kemiskinan. Dimana pada saat terjadi ketimpangan pendapatan maka akan memperparah kemiskinan atau bisa juga dikatakan bahwa ketimpangan merupakan bagian dari

kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam waktu lima tahun terakhir mengalami tren penurunan. Dimana pada tahun 2014 penduduk miskin Indonesia berjumlah 28,28 juta orang (11,25%) hingga pada tahun 2018 sebanyak 25,95 juta orang (9,82%) penduduk. Seiring dengan penurunan kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga mengalami penurunan dimana berdasarkan perhitungan rasio gini ketimpangan pendapatan Indonesia tahun 2014 sebesar 0,414 dan terus menurun hingga tahun 2018 berada pada angka 0,38 (BPS, 2018).

Namun penurunan kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia relatif lambat. Tercatat hingga tahun 2018 persentase kemiskinan terbesar masih berada di wilayah Indonesia bagian timur yaitu Maluku dan Papua, dimana persentase penduduk miskin mencapai angka 21,20% dari total penduduk. Sedangkan untuk ketimpangan terbesar terdapat di provinsi DIY dimana ketimpangan yang terjadi mencapai angka 0,422 (BPS 2018).

Infrastruktur merupakan ukuran posisi suatu bangsa di panggung global. Relevansi infrastruktur dengan dunia adalah fitur kedua yang dinilai oleh *World Economic Forum* (WEF) untuk menentukan daya saing suatu negara. Infrastruktur yang tidak efisien dan tidak memadai menyebabkan biaya transaksi yang tinggi yang dapat menghambat perekonomian dan kemajuan di bidang lainnya. Infrastruktur terdiri dari infrastruktur fisik yang mencakup transportasi, komunikasi dan lainnya, sedangkan infrastruktur sosial yang terdiri dari pendidikan kesehatan, sanitasi, listrik dan lainnya. Infrastruktur merupakan sifat dari layanan primer dan memiliki dampak yang nyata pada kualitas hidup manusia (MO 2016 dalam Chotia 2017).

Kualitas infrastruktur Indonesia berdasarkan *Global Competitiveness Report 2018* yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* (WEF) berada pada peringkat 45 dari 140 negara. Peringkat yang diperoleh apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia seperti Singapura, Malaysia, China, Australia, dan Thailand posisi Indonesia masih berada di bawah peringkat negara-negara tersebut. Dilihat dari beberapa infrastruktur fisik maupun non fisik Indonesia pada tahun 2018 seperti jalan masih tergolong rendah, dimana kondisi jalan dengan kualitas baik hanya sebesar 43,76%, dimana tidak lebih dari seproh dari total jalan di Indonesia yang memiliki kualitas baik, hal tersebut sangat berdampak terhadap akses kelancaran kegiatan baik di bidang sosial maupun ekonomi (BPS, 2018).

Sedangkan pada infrastruktur sanitasi dilihat dari persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi yang layak sebesar 69,27% dan sekitar 31% rumah tangga belum memiliki akses sanitasi layak. Kurangnya akses sanitasi layak dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang berbeda pada infrastruktur listrik, dimana akses terhadap listrik yang dihitung berdasarkan rasio elektrifikasi sebesar 98,3% dari jumlah seluruh rumah tangga di Indonesia. Angka tersebut sudah menunjukkan bahwa hampir dari seluruh penduduk Indonesia memiliki akses listrik untuk menunjang kegiatan baik sosial maupun ekonomi (BPS, 2018).

Capaian hasil dari pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dimana dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan dimana tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% dan mengalami penurunan pada tahun 2015 dimana pertumbuhan hanya sebesar 4,88% dan pada tahun berikutnya terus mengalami kenaikan hingga pada

tahun 2018 berada pada angka 5,17%. Walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat terdapat permasalahan lain yang dapat menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia kedepannya. Dimana masih terdapat masyarakat Indonesia yang rentan akan kemiskinan. Sebanyak 25,91 juta orang penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar 20,619% dari seluruh penduduk di Indonesia rentan jatuh dalam kemiskinan, disebabkan oleh pendapatan yang diterima hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Sehingga sampai saat ini kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat perekonomian Indonesia (Word Bank, 2019).

Selain kemiskinan, kurangnya ketersediaan infrastruktur yang layak dan tidak merata di setiap daerah juga dapat menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi dan upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. Sebagai mana yang dijelaskan dalam penelitian Chotia (2017) ketersediaan yang cukup dari layanan infrastruktur merupakan unsur yang sangat diperlukan dan esensial untuk mencapai tujuan ganda pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Melihat permasalahan tersebut maka penelitian ini berfokus membahas bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur dan ketimpangan pendapatan dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kesenjangan merupakan bagian dari kemiskinan. Kesenjangan dapat menyebabkan kemiskinan semakin parah. Sebagai roda penggerak ekonomi, infrastruktur memiliki peran penting dalam pengurangan kemiskinan. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan merata di setiap daerah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun pada saat ini kemiskinan masih



menjadi persoalan di Indonesia, masih banyak terdapat masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan di tengah tingkat kesenjangan di Indonesia yang menurun dan pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin melihat lebih lanjut pengaruh ketimpangan pendapatan dan pembangunan infrastruktur terhadap pengurangan kemiskinan, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur jalan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur listrik terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur sanitasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh ketersediaan infrastruktur jalan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh ketersediaan infrastruktur listrik terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh ketersediaan infrastruktur sanitasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.

